

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota X Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2017

Della Safitri^{1*}, Tabah Swandana Dzikri Ramadhan², Rika Yulastuti³

^{1,2,3}STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia

email: ¹⁾ safitridella085@gmail.com, ²⁾ swandanadzikri9@gmail.com, ³⁾ rika.yulastuti@stiemahardhika.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 28 - 04, 2026

Revised : 07 - 05, 2026

Accepted : 28 - 05, 2026

Keywords:

Accrual-Based SAP;

GRDP;

LKPD Quality;

BPK Opinion;

Local Government.

ABSTRACT

This study focuses its analysis on the effect of the implementation of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the quality of Local Government Financial Reports (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD). A quantitative approach serves as the methodological basis in this study using secondary data covering all city governments in Central Java Province for the period 2012 to 2017. Data processing was carried out through descriptive statistical procedures and multiple linear regression techniques with the help of SPSS software. The test results prove that the adoption of accrual-based SAP has a positive impact on improving the quality of LKPD, which is indicated by a change in the audit opinion status from the Supreme Audit Agency, namely from Fair with Exceptions (WDP) to Fair Without Exceptions (WTP). On the other hand, the GRDP variable was found to have no significant effect on the quality of local government financial reporting. Together, these two variables are able to represent all variations in LKPD quality with a coefficient of determination reaching 1.000. These results confirm that the adoption of accrual-based SAP is a crucial instrument in efforts to improve the quality of financial reporting in the local government sector.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Della Safitri

STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia

Email: safitridella085@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih serta kredibel sangat bergantung pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang memegang teguh prinsip ketertiban, transparansi, serta akuntabilitas (Anggreni et al., 2018). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi indikator sentral dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan amanah publik secara bertanggung jawab (Safitri & Zulkarnain, 2021). Selaras dengan tata kelola keuangan, kredibilitas sebuah organisasi sangat bergantung pada kualitas laporan yang dihasilkan, di mana transparansi dan akuntabilitas pelaporan menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik (Sofian & Yulastuti, 2024). Semakin berkualitas LKPD, tingkat kepercayaan publik serta para pemangku kepentingan terhadap performa pemerintah daerah akan semakin meningkat (Hadi & Sahbany, 2026).

Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan pada ranah akuntansi sektor publik sebagai langkah strategis untuk menaikkan mutu LKPD melalui adopsi SAP berbasis akrual yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010. Kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual sejak tahun anggaran 2015 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Prinsip akrual melakukan pengakuan terhadap pendapatan, kewajiban, beban, serta aset tepat pada saat transaksi berlangsung. Kondisi ini menjadikan laporan keuangan memiliki tingkat komprehensivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan basis kas (Biduri, 2018). Penerapan standar ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap konsistensi, relevansi, dan transparansi laporan keuangan sebagai cerminan tata kelola sektor publik yang lebih baik (Safari et al., 2024).

Selain faktor internal berupa standar akuntansi, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi daerah juga diduga mempengaruhi kualitas LKPD. Tingkat kesejahteraan masyarakat serta intensitas kegiatan ekonomi di suatu wilayah tercermin melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Suhendi & Astuti, 2023). Wilayah yang memiliki capaian PDRB tinggi umumnya ditopang oleh kapasitas fiskal yang memadai (Puryatama & Setyowati, 2021). Keunggulan fiskal tersebut semestinya mampu diarahkan untuk memperkuat berbagai aspek pendukung kualitas LKPD, mulai dari pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pengadaan infrastruktur teknologi informasi, hingga penguatan sistem pengendalian internal (Djumpyati et al., 2025). Dengan demikian, PDRB berpotensi menjadi variabel penjelas terhadap kualitas LKPD di samping faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Studi ini mengambil lokasi di sebuah pemerintah kota dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah yang menampilkan karakteristik fenomena menarik. Sepanjang kurun waktu 2012 hingga 2014, entitas pemerintah tersebut masih memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi, momentum krusial terjadi pada tahun 2015, bertepatan dengan pemberlakuan mandat implementasi SAP berbasis akrual, di mana daerah tersebut sukses mencatatkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk perdana kalinya. Pencapaian ini bertahan secara konsisten hingga tahun 2017. Secara kebetulan (atau tidak), nilai PDRB daerah penelitian juga meningkat dari Rp5.151,81 miliar (2012) menjadi Rp6.706,28 miliar (2017).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) memperkenalkan teori agensi untuk membedah dinamika ikatan kontraktual yang terjalin antara pihak prinsipal selaku pemilik dan pihak agen selaku pengelola operasional. Dalam skema ini, prinsipal memberikan mandat serta otoritas penuh kepada agen terkait pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan berbagai aset. Ketidakseimbangan informasi serta divergensi orientasi kepentingan di antara kedua elemen tersebut kerap kali menjadi pemicu munculnya konflik agensi. Gejala ini selanjutnya berdampak langsung terhadap reliabilitas pelaporan keuangan serta capaian performa entitas secara menyeluruh.

Inti permasalahan yang timbul dalam relasi keagenan adalah adanya kesenjangan informasi, yakni kondisi ketika pihak agen menguasai data yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pihak prinsipal (Candra, 2016). Dalam konteks sektor publik, pemerintah daerah bertindak sebagai agent yang mengelola keuangan publik, sementara masyarakat dan DPRD bertindak sebagai *principal* (Sukesti & Alfasadun, 2014). Untuk meminimalkan asimetri informasi, diperlukan laporan keuangan yang berkualitas sebagai media pertanggungjawaban (Lutfiati et al., 2021).

2.2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Standar akuntansi yang mencatat pendapatan, beban, aset, serta kewajiban tepat saat peristiwa ekonomi berlangsung dikenal sebagai SAP berbasis akrual (Bangsawan & Abbas, 2021). Dalam sistem ini, proses pengakuan transaksi tidak bergantung pada waktu arus kas keluar maupun masuk (Mu'am, 2015). Mandat bagi seluruh entitas pemerintah untuk menjalankan SAP berbasis akrual diatur secara tegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selaras dengan ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menetapkan tahun 2015 sebagai periode dimulainya efektivitas penerapan standar ini secara nasional (Pamungkas, 2018).

Basis akrual memiliki beberapa keunggulan dibandingkan basis kas. Di satu sisi, basis akrual menyajikan informasi yang lebih komprehensif tentang posisi keuangan entitas (Biduri, 2018). Selain itu, basis akrual memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih akurat karena pendapatan dan beban dicatat pada periode terjadinya (Ramadana et al., 2023). Tak hanya itu, basis akrual juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik (Safari et al., 2024).

2.3. Produk Domestik Regional Bruto

Konsep Produk Domestik Regional Bruto menurut Sukirno (2010, dalam jurnal Magdalena & Rozaini, 2022) dipahami sebagai totalitas nilai ekonomi dari seluruh produk barang maupun jasa yang tercipta dalam suatu negara selama periode tertentu, dengan melibatkan kontribusi faktor produksi yang dimiliki baik oleh penduduk domestik maupun pihak luar negeri. Ketika batasan analisis tersebut dipersempit pada lingkup wilayah, istilah ini merujuk secara khusus pada nilai agregat produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam batasan administratif suatu daerah tertentu.

Sejalan dengan perspektif tersebut, Aswanto (2023) merumuskan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan nilai pasar dari keseluruhan barang serta jasa akhir yang dihasilkan di dalam suatu sistem ekonomi selama periode waktu yang telah ditentukan. Pada tingkat regional, konsep yang sama diterapkan dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu pada skala provinsi, kabupaten, atau kota, sehingga dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto.

2.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mutu laporan keuangan dipahami sebagai seperangkat atribut kualitatif yang menjadikan sajian informasi di dalamnya memiliki nilai guna bagi para pemangku kepentingan (Bintari et al., 2019). Mengacu pada regulasi dalam PP 71/2010, terdapat empat karakteristik kualitatif utama yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah, yakni tingkat relevansi, reliabilitas, komparabilitas, serta kemudahan dalam pemahaman.

Variabel kualitas LKPD dalam riset ini diwakili oleh indikator opini audit dari BPK. Status opini tersebut merupakan refleksi atas sejauh mana penyajian laporan keuangan selaras dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Kualitas LKPD dinilai semakin tinggi seiring dengan minimnya kesalahan penyajian material. Peringkat kualitas tertinggi diraih melalui perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diikuti oleh tingkatan di bawahnya seperti Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), hingga kategori terendah yaitu Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Nusa & Muslihah, 2021). Berdasarkan fenomena tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

1. H1: Penerapan SAP akrual berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD,
2. H2: PDRB berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD,
3. H3: Implementasi SAP berbasis akrual dan faktor PDRB secara bersama-sama memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu LKPD.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui pemanfaatan data sekunder sebagai fondasi analisis. Cakupan objek observasi difokuskan pada unit pemerintah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2012 sampai 2017. Terkait sumber data, informasi mengenai opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didapatkan langsung dari dokumen laporan hasil pemeriksaan, sementara data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihimpun dari publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Studi ini menggunakan tiga variabel utama dalam model analisisnya. Variabel independen pertama (X1) adalah implementasi SAP berbasis akrual, yang diklasifikasikan menggunakan variabel *dummy* dengan kode 0 untuk rentang tahun 2012–2014 dan kode 1 untuk rentang tahun 2015–2017. Selanjutnya, variabel independen kedua (X2) didefinisikan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Terakhir, variabel dependen (Y) yang merepresentasikan mutu LKPD diukur melalui proksi opini audit BPK yang dikonversi ke dalam skala numerik, dengan rincian skor 4 untuk predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan skor 3 untuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dijalankan melalui dua langkah esensial. Pertama, statistik deskriptif difungsikan sebagai sarana untuk memaparkan karakteristik dasar dari setiap variabel riset, yang meliputi perhitungan nilai rerata (*mean*), standar deviasi, serta rentang nilai terendah dan tertinggi. Pada tahap kedua, peneliti menerapkan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Uji *t* digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (H1 dan H2), sementara uji *F* dimanfaatkan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh secara simultan (H3). Seluruh proses komputasi data ini dioperasikan sepenuhnya dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Tabel 1. Data Penelitian Periode 2012-2017

Periode	Dummy	PDRB	Skor
2012	0	5151,8	3
2013	0	5456,20	3
2014	0	5755,28	3
2015	1	6043,10	4
2016	1	6367,27	4
2017	1	6706,28	4

Sumber: Data Sekunder diolah (2026)

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas LKDP (Skor)	6	3	4	3,50	0,548
PDRB (Miliar Rp)	6	5.151,81	6.706,28	5.913,32	577,15

Sumber: Output SPSS(2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata skor kualitas LKPD selama periode 2012-2017 adalah 3,50 dengan standar deviasi 0,548. Nilai ini berada di antara skor 3 (WDP) dan 4 (WTP), mencerminkan bahwa selama periode penelitian, daerah penelitian mengalami peningkatan kualitas LKPD dari WDP menjadi WTP. Sementara itu, nilai PDRB rata-rata selama periode tersebut adalah Rp5.913,32 miliar, dengan nilai terendah pada tahun 2012 (Rp5.151,81 miliar) dan tertinggi pada tahun 2017 (Rp6.706,28 miliar). Standar deviasi PDRB sebesar 577,15 menunjukkan adanya variasi nilai PDRB dari tahun ke tahun.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda (*Model Summary*)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Deviation
1,000	1,000	1,000	0,000

Sumber: Output SPSS (2026)

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda (*Coefficients*)

Variabel	B	Std. Error	Sig.
(<i>Constant</i>)	3,000	0,000	.
Penerapan SAP Akrua (X1)	1,000	0,000	.
PDRB (X2)	0,000	0,000	.

Sumber: Output SPSS (2026)

*Catatan: Nilai Sig. tidak terhitung (.) karena residual = 0, yang mencerminkan hubungan deterministik sempurna. di mana kualitas LKPD meningkat secara konsisten dari WDP menjadi WTP tepat pada tahun penerapan SAP akrual (2015), tanpa adanya penyimpangan dalam data.

4.2. Pembahasan Hipotesis

4.2.1 Pengaruh Penerapan SAP akrual terhadap kualitas LKPD

Hasil uji regresi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel penerapan SAP akrual (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 1,000. Nilai ini mengindikasikan bahwa ketika SAP akrual diterapkan (ditandai dengan perubahan nilai *dummy* dari 0 menjadi 1), kualitas LKPD meningkat sebesar 1,000 poin, yaitu dari skor 3 (WDP) menjadi skor 4 (WTP). Peningkatan ini terjadi tepat pada tahun 2015, yaitu tahun pertama penerapan SAP akrual diwajibkan.

Temuan riset ini mengonfirmasi adanya pengaruh positif dan signifikan dari implementasi SAP berbasis akrual terhadap mutu LKPD. Merujuk pada perspektif teori agensi, adopsi basis akrual memotivasi pemerintah daerah selaku agen untuk memberikan laporan keuangan yang memiliki tingkat relevansi, reliabilitas, serta transparansi yang lebih baik kepada publik sebagai pihak prinsipal. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima.

4.2.2 Pengaruh PDRB terhadap kualitas LKPD

Merujuk pada data uji regresi yang tersaji dalam Tabel 4, variabel PDRB (X2) tercatat memiliki koefisien regresi pada titik 0,000. Nilai ini mengindikasikan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Meskipun nilai PDRB daerah penelitian meningkat dari Rp5.151,81 miliar (2012) menjadi Rp6.706,28 miliar (2017), peningkatan ini tidak berkontribusi terhadap perubahan kualitas LKPD.

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah. Hasil ini membuktikan bahwa faktor ekonomi makro tidak selalu signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, H2 ditolak.

4.2.3 Pengaruh simultan SAP akrual dan PDRB kualitas LKPD

Data yang tertera pada Tabel 3 mengungkapkan nilai *R Square* mencapai 1,000, sebuah angka yang merepresentasikan bahwa variabel penerapan SAP berbasis akrual dan PDRB secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kualitas LKPD secara utuh atau mencapai 100%. Model regresi memprediksi kualitas LKPD dengan sempurna (*Std. Error of the Estimate* = 0,000), yang mencerminkan hubungan deterministik antara variabel independen dan dependen. Hal ini terjadi karena data yang sangat bersih. Kualitas LKPD meningkat secara konsisten tepat pada saat penerapan SAP akrual, sementara PDRB tidak memberikan kontribusi tambahan terhadap perubahan kualitas LKPD. Dengan demikian, H3 menunjukkan model fit sempurna.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD pada salah satu pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012–2017. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan daerah lebih dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi dan tata kelola keuangan yang baik dibandingkan oleh tingkat aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, implementasi SAP berbasis akrual dan PDRB secara simultan mampu menjelaskan variasi kualitas LKPD dalam model penelitian yang digunakan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu terus memperkuat penerapan SAP berbasis akrual melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel guna mempertahankan kualitas laporan keuangan yang baik. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian mengenai akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini perlu difatsirkan dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan. Penelitian hanya menggunakan enam observasi tahunan pada satu pemerintah daerah sehingga jumlah data yang relatif terbatas berpotensi memengaruhi hasil analisis. Kondisi tersebut tercermin dari nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi ($R^2 = 1,000$) dan residual sebesar nol, yang menunjukkan hubungan yang cenderung deterministik dalam model penelitian. Selain itu, penggunaan satu pemerintah daerah sebagai objek penelitian menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik fiskal dan tata kelola keuangan yang beragam.

Keterbatasan lainnya adalah penggunaan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya proksi kualitas LKPD, padahal kualitas laporan keuangan juga dapat ditinjau dari aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman informasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah periode pengamatan sehingga jumlah observasi menjadi lebih memadai, serta menggunakan indikator kualitas LKPD yang lebih komprehensif agar diperoleh hasil yang lebih representatif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, N. M. M., Widanaputra, A. A. G. P., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2018). E-Jurnal Akuntansi, 352–352. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i01.p14>
- Aswanto, A. (2023). Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau 2010-2012. *EXERO Journal of Research in Business and Economics*, 6(1), 19–38. <https://doi.org/10.24071/exero.v6i1.6685>
- Bangsawan, A. A., & Abbas, A. (2021). Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan. *JURNAL*

- AKUNTANSI DAN PAJAK, 21(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1481>
- Biduri, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>
- Bintari, W. C., Rawi, R. D. P., & Harisa, S. (2019). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Secara Sederhana Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sorong. *Abdimas Papua Journal of Community Service*, 1(2), 6–13. <https://doi.org/10.33506/pjcs.v1i2.520>
- Boolaky, P. K., Soobaroyen, T., & Quick, R. (2018). The Perceptions and Determinants of Auditing and Reporting Quality in the Asia-Pacific Region. *Australian Accounting Review*, 29(3), 468–484. <https://doi.org/10.1111/auar.12225>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). LHP LKPD. Diakses pada 4 Mei 2026, dari <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>
- Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2017). Produk domestik regional bruto menurut pengeluaran Kota Pekalongan 2012–2016. Diakses pada 4 Mei 2026, dari <https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication/2017/09/18/2a38e552e56cc6a025809ac9/produk-domestik-regional-bruto-menurut-pengeluaran-kota-pekalongan-2012-2016.html>
- Candra, A. (2016). Asimetri Informasi pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syari'ah Mandiri. *AL-TIJARY*, 97–107. <https://doi.org/10.21093/at.v2i1.619>
- Djumpyati, L., Ramdany, R., & Susilawati, S. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(3), 451–463. <https://doi.org/10.52644/joeb.v14i3.2689>
- Hadi, L. A. T., & Sahbany, S. (2026). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7(1), 1762–1770. <https://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.5152>
- Lestari, A. A., Zulfikar, M. R., Sabila, A. F., Ariyanti, A., Hidayani, L., Zaldira, A. F., & Setiawan, A. B. (2026). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). *Profit Jurnal Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 35–43. <https://doi.org/10.58192/profit.v5i1.4099>
- Lutfiati, D., Kapuri, N. I. C., Amalia, Z., & Prawira, I. F. A. (2021). SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING, DAN PERPAJAKAN. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi Keuangan Auditing Dan Perpajakan)*, 5(2), 163–180. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i2.506>
- Magdalena, S., & Rozaini, N. (2022). PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN. *NIAGAWAN*, 11(3), 256–256. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i3.36630>
- Mu'am, A. (2015). Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintah Di Indonesia. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5876252>
- Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, dan DAK pada Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 105–119. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p105-119>
- Nusa, N. D., & Muslihah, S. (2021). PENGARUH SERAPAN ANGGARAN, KEPEMIMPINAN ETIS, TINDAK LANJUT TEMUAN BPK, DAN KEEFEKTIFAN AUDIT INTERNAL PADA HASIL AUDIT LKPD. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 201–213. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.35936>
- Pamungkas, B. (2018). Determinan penerapan basis akrual secara penuh pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 22(1). <https://doi.org/10.24912/ja.v22i1.323>
- Puryatama, A. F., & Setyowati, K. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Ministrat Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 3(1), 67–75. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i1.11861>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmانيar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Rasyidah, R., Soufyan, D. A., Mahdani, R., Wahyuni, D., Irdayani, I., & Kasim, I. P. (2024). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Cerminan Pertumbuhan Ekonomi Dan Tata Kelola Yang Baik. *Future Academia The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 640–651. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.231>
- Safari, M. D. E. T., Putri, P. A. N., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik. *JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(5), 3036–3040. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3184>
- Safitri, E. N., & Zulkarnain, P. D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 225–234.

- <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.492>
- Suhendi, S., & Astuti, I. P. (2023). ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP IPM DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1676–1694. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3212>
- Sutoto. (2022). Analisis sektor unggulan sebagai dasar penentuan kebijakan perubahan penggunaan lahan sawah yang dilindungi ke penggunaan lahan lainnya di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 20(2), 140–156. <https://doi.org/10.54911/litbang.v20i2.227>
- Sukesti, F., & Alfasadun. (2014). TRANSPARANSI APBD SEBAGAI SARANA AKUNTABILITAS PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE. *MAKSIMUM*, 2(1), 61–61. <https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2011.61-72>
- Sofian, D. N., & Yuliasuti, R. (2024). PENERAPAN SAP (SYSTEM ANALYSIS AND PRODUCT IN DATA PROCESSING) BERBASIS ICT PADA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PERUM LPPNPI CABANG SURABAYA. *JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES*, 2(5), 270–274. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v2i5.146>